

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN TEGAL

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)

Kantor Kesbangpol dan Linmas kepada Bupati Tegal

2015



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pelaksanaan program kerja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran staf dan pejabat Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal serta dukungan dan kerja sama semua pihak yang terkait.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tegal, Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan amanat PP. No. 3 Tahun 2010 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam menilai pelaksanaan program kerja pemerintah. Atas dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Slawi, Januari 2016

**KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN TEGAL**

M. AGUS SUNARJO
Pembina Tingkat I
NIP19590914 198411 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Visi dan Misi.....	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Urusan	2
1. Permasalahan	3
2. Upaya Pemecahan Masalah	4
3. Skala Prioritas	5
BAB II. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB/PILIHAN	7
a. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	8
b. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal.....	24
c. SKPD Penyelenggara.....	25
d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	26
e. Tugas Pembantuan	26
f. Kerjasama Daerah.....	26
g. Permasalahan dan Solusi	26
BAB III. PENUTUP	28
LAMPIRAN	
1. Formulir III.1 IKK Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014, Aspek Penilaian Pada Pengambil Kebijakan	

2. Formulir III.2, IKK Pada Tataran Pelaksanaan 8 (Delapan) Aspek Administrasi Umum Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014
3. Formulir III.3 IKK Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014, Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian	13
Tabel 2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Kepangkatan pada Masing-masing Bagian.....	14
Tabel 2.3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Masing-masing Bagian.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi pada SKPD Kantor Kesbangpol dan Linmas	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Tegal, maka Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal memiliki Visi sebagai berikut : *“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Serta Perlindungan Masyarakat, Didukung Masyarakat Yang Demokratis Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum”*

Pernyataan visi tersebut memiliki beberapa pokok pengertian sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, memiliki perbedaan suku, bahasa, agama dan budaya namun bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan yang kokoh di dalam masyarakat dari setiap daerah yang berwawasan kebangsaan menjadi landasan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Perlindungan Masyarakat, mengandung arti bahwa terwujudnya kondisi yang memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai warga negara dengan adanya perlindungan negara, terjaminnya hak-hak warga negara, terciptanya keamanan dan ketertiban umum.
3. Masyarakat yang Demokratis, mengandung arti kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi, menghormati perbedaan dan menentukan keputusan bersama berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
4. Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum, mengandung arti kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan perumusan dan penyiapan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa;
2. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang politik dan hubungan antar lembaga;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Urusan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.¹ Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,² dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

¹ Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 13, Ayat (1) Huruf c.

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 7, Ayat (2), Huruf c.

memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal membentuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Tegal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah berbentuk kantor, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sebagai bagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Kantor Kesbangpol dan Linmas dipimpin oleh Kepala dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan tahun 2015 adalah :

- 1) Mulai lunturnya penerapan ideology Pancasila di kalangan Masyarakat, menurunnya pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan menurunnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, rasa toleransi di segala aspek kehidupan serta rasa solidaritas dan kesetiakawanan social di kalangan Masyarakat.
- 2) Adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris, keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)
- 3) Adanya tuntutan dan aksi yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, ormas dan organisasi profesi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4) Adanya permasalahan lalu lintas, keamanan dan ketertiban wilayah berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru

Selain itu masih terdapat permasalahan atau kendala intern Organisasi Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal yang berpengaruh terhadap proses pencapaian sasaran kinerja yang telah ditargetkan diantaranya :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kerja terutama sarana gedung kantor yang belum proporsional antara kebutuhan ruang dengan jumlah Bagian dan Seksi yang ada beserta stafnya;
- 2) Arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran. Alokasi anggaran untuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didistribusikan secara memadai. Pendanaan program dan kegiatan masih belum mencukupi untuk mengoptimalkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran program;

- 3) Keterlambatan dalam siklus penetapan anggaran yang menyebabkan keterlambatan keterlambatan dalam memulai pelaksanaan kegiatan;
- 4) Terdapat perubahan kebutuhan yang tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran pada awal tahun anggaran;
- 5) Kurangnya kerjasama dan disiplin pertanggungjawaban keuangan dari pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan maupun pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- 6) Kurangnya kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa yang disertai rendahnya integritas sebagai aparatur negara, sehingga menimbulkan hambatan yang cukup signifikan terhadap capaian kinerja tahun 2015 ini;
- 7) Lemah dan kurangnya jaminan perlindungan dan pendampingan hukum sehingga melemahkan mental dan integritas aparatur negara.

2. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan aparat keamanan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana serta pengamanan wilayah
- 2) Melakukan pendidikan dan sosialisasi di masyarakat berkaitan dengan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- 3) Terus memonitor keberadaan orang asing di Wilayah Kabupaten Tegal sebagai pencegahan kemungkinan terjadi aksi terorisme dan melakukan evaluasi keberadaan orang asing tersebut terhadap data anggota jaringan terorisme.
- 4) Memberdayakan peran dan fungsi Hansip/Linmas dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban di wilayah.

- 5) Terus mengadakan diskusi antar umat beragama guna meningkatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan sehingga memperkecil resiko terjadinya perselisihan antar umat beragama.

Sedangkan untuk pemecahan masalah atau kendala intern maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang kinerja;
- 2) Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Meningkatkan kerjasama dan disiplin pertanggungjawaban keuangan dari pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga keterlambatan dalam pencairan maupun pertanggungjawaban keuangan kegiatan dapat diminimalisir;
- 4) Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih dapat melakukan upaya perlindungan dan pendampingan hukum guna meningkatkan semangat dan integritas sebagai aparatur negara yang profesional.

Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

3. Skala Prioritas

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat maka dibuat skala prioritas penanganan masalah menurut tingkat prioritas dan dampak akibat dari permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris,

keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)

- 2) Mulai lunturnya penerapan ideology Pancasila di kalangan Masyarakat, menurunnya pemahaman akan Wawasan Kebangsaan dan menurunnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, rasa toleransi di segala aspek kehidupan serta rasa solidaritas dan kesetiakawanan social di kalangan Masyarakat.

Permasalahan pertama di atas merupakan permasalahan yang pasti ada dan selalu ada setiap waktu. Oleh karena itu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat mengagendakan kegiatan rutin dalam penanganan masalah tersebut setiap tahunnya, dengan melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan aparat keamanan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana serta pengamanan wilayah;

Permasalahan kedua di atas menjadi dasar urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi di masyarakat berkaitan dengan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa; terus memonitor keberadaan orang asing di Wilayah Kabupaten Tegal sebagai pencegahan kemungkinan terjadi aksi terorisme dan melakukan evaluasi keberadaan orang asing tersebut terhadap data anggota jaringan terorisme; memberdayakan peran dan fungsi Hansip/Linmas dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban di wilayah; terus mengadakan diskusi antar umat beragama guna meningkatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan sehingga memperkecil resiko terjadinya perselisihan antar umat beragama.

BAB II

4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

A. Kondisi Umum

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan tonggak berlakunya kebijakan otonomi daerah telah membawa implikasi terjadinya perubahan struktur, peran dan fungsi pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal.

Sejak diterapkannya otonomi daerah maka kebijakan pembentukan organisasi dan lembaga teknis sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dan mengacu pada keberadaan Departemen (Kementrian) maupun Lembaga yang ada di tingkat Pusat.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah sebagai dasar pembentukan organisasi dan lembaga teknis sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tegal.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Tegal merupakan lembaga teknis yang dibentuk untuk menjalankan Urusan Wajib penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat yang dikepalai oleh Kepala Kantor dengan jenjang jabatan struktural Eselon III/a, berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal, Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.

B. Kebijakan Program

Pada tahun 2015 program-program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
11. Program Pendidikan Politik Masyarakat

C. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Anggaran : 1.133.371.000,-

Realisasi : 1.109.738.048,-

2. Realisasi Belanja Langsung

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan jasa	21.500.000,-	12.762.201,-	59,36%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien	12 bulan	12 bulan	100%
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan/ Tersedia honor untuk 1 orang tenaga administrasi keuangan (PTT) Outcome : Terciptanya administrasi keuangan yang tertib , efektif	15.258.000,- 12 bulan	15.246.000,- 12 bulan	99,92% 100%
3.	Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien	15.000.000,- 50 item	15.000.000,- 50 item	100% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien	10.000.000,- 9 item	10.000.000,- 9 item	100% 100%
5.	Penyediaan peralatan rumah tangga Output : Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 1 paket selama 1 tahun Outcome : Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien	10.000.000,- 34 item	9.988.900,- 34 item	99,89% 100%
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan, buku dan peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatkan wawasan dan pengetahuan staf serta	5.000.000,- 12 bulan	5.000.000,- 12 bulan	100% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	terkutinya perkembangan informasi baik daerah, nasional maupun internasional untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas.			
7.	<p>Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>Output : Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat</p> <p>Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib, efektif dan efisien</p>	<p>25.000.000,-</p> <p>12 bulan</p>	<p>17.786.000,-</p> <p>12 bulan</p>	<p>71,14%</p> <p>100%</p>
8.	<p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p>Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas</p> <p>Outcome : Terciptanya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan para pihak terkait untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas</p>	<p>55.000.000,-</p> <p>12 bulan</p>	<p>38.759.250,-</p> <p>12 bulan</p>	<p>70,47%</p> <p>100%</p>

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.	Pembangunan Gedung Kantor Output : Terbangun satu gedung kantor yang memadai untuk penyimpanan barang dan arsip, ruang perpustakaan, ruang laktasi dan ram difabel Outcome : Tersimpannya barang dan arsip secara memadai serta tersedianya ruang laktasi dan ram difabel untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas	140.000.000,- 1 gedung	0,- 0 gedung	00,00% 00,00%
2.	Pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya Output : Tersedianya Laptop dan Personal Computer (PC) Outcome : Meningkatnya produktivitas kerja, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas	17.000.000,- 2 unit Laptop 1 unit PC	16.960.000,- 2 unit Laptop 1 unit PC	99,76% 100%
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	10.000.000,-	9.999.850,-	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	<p>Output : Terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>Outcome : Meningkatnya produktivitas kerja, efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan tugas</p>	1 paket pengecatan gedung	1 paket pengecatan gedung	100%
4.	<p>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional</p> <p>Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>Outcome : Meningkatnya produkvtas kerja,efisiensi,efektivi- tas dalam pelaksanaan tugas</p>	60.000.000,-	36.566.300,-	60,94%
	<p>Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas</p> <p>Outcome : Meningkatnya produkvtas kerja,efisiensi,efektivi- tas dalam pelaksanaan tugas</p>	-2 Unit Mobil -5 Unit Sepeda Motor -3336 liter BBM	-2 Unit Mobil -5 Unit Sepeda Motor -3336 liter BBM	100%
5.	<p>Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</p> <p>Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor</p> <p>Outcome : Meningkatnya</p>	10.000.000,-	9.160.000,-	91,10%
	<p>Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor</p> <p>Outcome : Meningkatnya</p>	- 6 unit Komputer - 6 Unit Printer - 4 Unit Mesin Ketik	- 6 unit Komputer - 6 Unit Printer - 4 Unit Mesin Ketik	80%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	produktivitas kerja ,efisiensi,efektivitas dalam pelaksanaan tugas	- 3 Unit AC - 400 m ² Meubelair	- 3 Unit AC	
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1.	Pendidikan dan pelatihan formal Output : Terlaksananya keikutsertaan karyawan/karyawati dalam pendidikan dan pelatihan formal baik teknis maupun fungsional Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas	10.000.000,- 2 orang	0,- 0 orang	00,00% 00,00%
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1.	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Output : Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD Outcome : Tersedianya honor pengelola keuangan SKPD	18.000.000,- 12 bulan	18.000.000,- 12 bulan	100% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
2.	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah Output : Tersedianya honor pengelola barang milik daerah Outcome : Tersedianya honor pengelola barang milik daerah	12.000.000,- 12 bulan	12.000.000,- 12 bulan	100% 100%
3.	Penyusunan renja dan lakip SKPD Output : Tersusunnya LAKIP dan Renja SKPD Outcome : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil capaian kinerja SKPD	5.000.000,- @ 5 buku	5.000.000,- @ 5 buku	100% 100%
4.	Penyusunan LKPJ Output : Tersusunnya dokumen LKPJ SKPD Outcome : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil capaian kinerja SKPD	10.000.000,- 5 buku	9.750.000,- 5 buku	97,50% 100%
v.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			
1.	Penyiapan tenaga pengendali keamanan	50.000.000,-	36.986.000,-	73.97%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	<p>dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Output :</p> <p>Terlaksana pembinaan Satlinmas/ pengiriman diklat Hansip/ Linmas dan keikutsertaan dalam upacara HUT Hansip/Linmas tingkat provinsi</p> <p>Outcome :</p> <p>Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah</p>	40 orang	40 orang	100%
2.	<p>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Output :</p> <p>Terlaksana pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Outcome :</p> <p>Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah</p>	85.000.000,-	71.780.446,-	84,45%
	<p>dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Output :</p> <p>Terlaksana pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Outcome :</p> <p>Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah</p>	30 orang 1 kali	30 orang 1 kali	100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
3.	Pengendalian keamanan lingkungan Output : Terlaksana kerjasama pengamanan wilayah dengan aparat keamanan di daerah pada saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah	380.000.000,- 2 kegiatan	330.578.100,- 2 kegiatan	84,77% 100%
VI.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
1.	Penyelenggaraan pameran investasi Output : Terlaksana kegiatan pameran investasi Outcome : Tersedia informasi potensi peluang investasi di kabupaten Tegal	7.500.000,- 1 kali	7.500.000,- 1 kali	100% 100%
VII.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
1.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	130.000.000,-	125.128.750,-	96,25%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	<p>Output : Terlaksana kerjasama dengan aparat keamanan dalam deteksi dini, pencegahan dan pengendalian Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap negara melalui kerjasama Komunitas Intelejen Daerah</p> <p>Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah</p>	12 kali	12 kali	100%
2.	<p>Monitoring, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>Output : Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban secara rutin dari tiap wilayah kecamatan</p> <p>Outcome : Terciptanya data yang akurat untuk keamanan dan ketertiban masyarakat serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah</p>	50.000.000,- 2 kali	42.155.000,- 2 kali	84,31% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
VIII.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Output : Terlaksananya pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Outcome : Terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan penganut kepercayaan	50.000.000,- 11 kali	36.233.020,- 11 kali	72,47% 100%
2.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Output : Terlaksana pembinaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Outcome : Terciptanya persatuan dan persaudaraan masyarakat Kabupaten Tegal	20.000.000,- 1 kali	18.550.000,- 1 kali	92,75% 100%
3.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Output : Terlaksana rangkaian	75.000.000,- 1 paket giat	72.663.900,- 1 paket giat	96,89% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	kegiatan peringatan HUT RI tingkat Kabupaten Tegal Outcome : Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa			
ix.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
1.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Output : Terlaksana diskusi wawasan kebangsaan Outcome : Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat	45.000.000,- 1 kali	40.978.081,- 1 kali	91,06% 100%
x.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			
1.	Pembinaan satuan keamanan lingkungan (Linmas Inti) Output : Terlaksana pembinaan Satuan Linmas Inti Kabupaten Tegal Outcome : Terbinanya satuan Linmas Inti Kab. Tegal	45.500.000,- 30 personil 1 kali	32.011.000,- 30 personil 1 kali	70,35% 100%
2.	Pemberian tanda penghargaan bagi anggota hansip/ linmas yang meninggal dunia	50.000.000,-	-	00,00%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	<p>Output : Terlaksananya pemberian penghargaan kepada Hansip/Linmas</p> <p>Outcome : Meningkatnya motivasi, disiplin kerja, dan kesejahteraan anggota hansip/ linmas</p>	40 orang	0 orang	00,00%
3.	<p>Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)</p> <p>Output : Tersediannya kebutuhan untuk fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat</p> <p>Outcome : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui FKDM</p>	40.000.000,- 9 kali	29.443.000,- 9 kali	73,61% 100%
XI.	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
1.	<p>Penyuluhan kepada masyarakat</p> <p>Output : Terlaksananya penyuluhan pengurus Ormas, LSM, Parpol dan tersedianya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah</p>	50.000.000,- 1 kegiatan	34.571.000,- 1 kegiatan	69,14% 100%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Ormas, LSM serta Parpol			
2.	Fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan partai politik Output : Terlaksana mediasi dan fasilitasi perselisihan partai politik dan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik Outcome : Terciptanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan organisasi sosial politik	35.000.000,- 1 kali	28.914.000,- 1 kali	82,61% 100%
3.	Sosialisasi dan fasilitasi organisasi masyarakat Output : terlaksana penyusunan data base ormas sesuai Permendagri 33 Outcome : terciptanya akurasi dan validasi data ormas	35.000.000,- 1 kali	24.453.000,- 1 kali	69,87% 100%

D. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal sesuai dengan Target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. Secara umum program kerja yang telah dilaksanakan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal selama tahun 2015 secara umum berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa permasalahan/kendala ditemui dalam pelaksanaan kegiatan namun semua program kerja dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi anggota Linmas Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan SPM sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 untuk pelayanan dasar Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengamanan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016 dapat berjalan sesuai rencana berkat kerja sama dengan aparat terkait baik TNI, Polri, Linmas, Dinas dan instansi terkait serta semua unsur masyarakat. Dalam usaha pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal, Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai suatu wadah bagi aspirasi masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu bersama Pemerintah Kabupaten Tegal telah membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan anggota dari berbagai Instansi yang terkait dengan urusan keamanan daerah sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan dan pemecahannya terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk penanganan dini terkait terorisme di Kabupaten Tegal, Kantor Kesbangpol dan Linmas telah bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Pemalang, Kepolisian Resot Tegal, Kodim 0712 Tegal, Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil guna memantau keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Tegal.

Dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tegal, Kantor Kesbangpol dan Linmas menyelenggarakan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Melalui kegiatan tersebut, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), diharapkan potensi konflik yang disebabkan oleh sudut pandang dan idealisme keagamaan akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan jiwa dan semangat nasionalisme warga Kabupaten Tegal maka Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan peningkatan rasa solidarisme dan ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui fasilitasi Forum Persatuan Bangsa Indonesia. Kegiatan rutin tiap tahun yaitu penyelenggaraan rangkaian Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI tetap dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Untuk kegiatan Bantuan Keuangan Partai Politik, Kabupaten Tegal masih termasuk 9 kabupaten /kota di Jawa Tengah yang dinilai cukup bagus dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Hal ini ditunjang dengan adanya kegiatan fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan partai politik. Pertumbuhan politik di dalam masyarakat berkembang cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui aplikasi database Organisasi Masyarakat yang menunjukkan adanya aktivitas politik di kalangan masyarakat melalui pembentukan Organisasi Masyarakat (ORMAS) bidang pendidikan, kesenian, kepemudaan, keagamaan serta tumbuhnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tegal. Guna meningkatkan kesadaran politik dalam masyarakat Kantor Kesbangpol dan Linmas menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat akan

pentingnya sadar politik guna bersama-sama membangun politik Kabupaten Tegal yang sehat.

Secara umum kondisi dan situasi ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) di wilayah Kabupaten Tegal cukup kondusif dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal. Selama tahun 2015 tidak terdapat permasalahan maupun gangguan yang cukup serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. SKPD Penyelenggara

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal

F. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- Jumlah Pegawai 21 orang
 - PNS/CPNS : 20 orang
 - PTT : 1 orang
 - Kualifikasi Pendidikan
 - Pasca Sarjana (S2) : - orang
 - Sarjana (S1)/ DIV : 6 orang
 - Ahli Madya (DIII)/ Sarjana Muda : 1 orang
 - SMA : 13 orang
 - SMP : 1 orang
- Pangkat dan Golongan
 - Golongan IV : 1 orang
 - Golongan III : 12 orang
 - Golongan II : 7 orang
 - Golongan I : - orang
- Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
 - Struktural : 5 orang
 - Fungsional : - orang

G. Tugas Pembantuan

Tidak ada

H. Kerjasama Daerah

Tidak ada

I. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan tahun 2015 adalah :

1. Menurunnya jiwa dan semangat kebersamaan sebagai warga dan rakyat Indonesia, menurunnya jiwa dan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan masyarakat.
2. Adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan adanya jaringan kelompok teroris, keberadaan kelompok radikal, potensi konflik berlandaskan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
3. Tingginya angka protes, tuntutan dan aksi yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, ormas dan organisasi profesi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Adanya permasalahan lalu lintas, keamanan dan ketertiban wilayah berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru
5. Kapasitas staf pengelola kegiatan secara umum pada Kantor Kesbangpol dan Linmas yang dinilai masih belum tercukupi sehingga pencapaian sasaran dirasa sangat berat dan perlu kerja keras ekstra.

Solusi yang dilakukan oleh urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama intensif dengan aparat keamanan daerah dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana serta pengamanan wilayah.
2. Melakukan pendidikan dan sosialisasi di masyarakat berkaitan dengan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa.
3. Terus memonitor keberadaan orang asing di Wilayah Kabupaten Tegal sebagai pencegahan kemungkinan terjadi aksi terorisme dan melakukan

evaluasi keberadaan orang asing tersebut terhadap data anggota jaringan terorisme.

4. Memberdayakan peran dan fungsi Hansip/Linmas dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban di wilayah.
5. Terus mengadakan diskusi antar umat beragama guna meningkatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan sehingga memperkecil resiko terjadinya perselisihan antar umat beragama.
6. Mengadakan diskusi di kalangan pemuka masyarakat guna menumbuhkan kembali semangat dan jiwa wawasan kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air melalui Forum Persatuan Bangsa Indonesia (FPBI)
7. Mengadakan diklat fungsional tertentu untuk meningkatkan kapasitas staf pengelola kegiatan secara umum.

Slawi, Januari 2016

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Tegal

M. AGUS SUNARJO

Pembina Tk. I

NIP. 19590914 198411 1 002

BAB III

P E N U T U P

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan telah mencapai Standard Pelayanan Minimal.

Berbagai upaya perbaikan diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Tahun 2015 untuk Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Slawi, Januari 2016
**Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Tegal**

M. AGUS SUNARJO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590914 198411 1 002

LAMPIRAN III.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Kabupaten : Tegal

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah	7	Demo / Protes terhadap PERDA / Peraturan Bupati	4 aksi demo per tahun	Dokumen Kesbangpol dan Linmas Jumlah demo berijin: 1 Pelaku : HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kab. Tegal Tempat : Halaman Kantor DPC HNSI Kab. Tegal (TPI) Ds. Suradadi Kec. Suradadi Tanggal : 28 Januari 2015 Pukul : 10.00 s.d. 10.45 WIB Tuntutan : a. Perjuangkan hak-hak nelayan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 tahun 2015	100 %	Kantor Kesbang pol dan Linmas Kab. Tegal

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
						<p>b. Pembatalan atau pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 2 tahun 2015 yang dinilai tidak pro nelayan lokal</p> <p>2 Pelaku : 85 orang warga Desa Bojongsana yang tergabung dalam Kelompok Peduli Masyarakat Desa Bojongsana</p> <p>Tempat : Pendopo Balai Desa Bojongsana Kec. Suradadi</p> <p>Tanggal : 9 April 2015</p> <p>Pukul : 10.00 s.d. 10.40 WIB</p> <p>Tuntutan : Kades Bojongsana agar dipecat dari jabatannya karena diduga telah berselingkuh dengan anak tirinya.</p>		

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
						<p>3 Pelaku : 10 orang anggota Aliansi Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)</p> <p>Tempat : Depan pintu masuk Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa)</p> <p>Tanggal : 8 Juni 2015</p> <p>Pukul : 10.00 s.d. 11.30 WIB</p> <p>Tuntutan : meminta Jokowi- Jk stabilkan harga BBM, segera benahi system Kabinet Kerja, batasi investasi asing.</p>		

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
						<p>4 Pelaku : 120 orang Bidan dari 29 Puskesmas se-Kab. Tegal</p> <p>Tempat : Kantor Kementerian PAN RB dan Istana Negara</p> <p>Tanggal : 27 September 2015</p> <p>Waktu : berangkat pukul 20.25 WIB</p> <p>Tuntutan : menagih janji bidan PTT yang akan diangkat menjadi PNS</p>		

Slawi, Januari 2016

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Tegal

M. AGUS SUNARJO

Pembina Tk.I

NIP. 19590914 198411 1 002

LAMPIRAN III.3

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

No	URUSAN	No.	IKK	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data**)	Ket
URUSAN WAJIB								
19	Kesbang & Politik	60	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah		1 kegiatan	Kantor Kesbangpol dan Linmas	Kegiatan pembinaan politik daerah: 1. Fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan partai politik
		61	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		4 kegiatan	Kantor Kesbangpol dan Linmas	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP: 1. Bantuan peran dan fungsi FKUB/FKKB (Peningkatan solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat) 2. Fasilitasi FKDM

No	URUSAN	No.	IKK	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	Sumber Data**))	Ket
								3. Pelatihan Pengurus Parpol, Ormas dan LSM ke Tk. Provinsi (Penyuluhan kepada masyarakat) 4. Sosialisasi dan fasilitasi organisasi masyarakat

Slawi, Januari 2016

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Tegal

M. AGUS SUNARJO

Pembina Tk.I

NIP. 19590914 198411 1 002

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN : TEGAL

NAMA SKPD : KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), dalam pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 5 program: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 2. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; 3. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; 4. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; 5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD dalam pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 3 program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, sebanyak 5 program: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah; 2. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan; 3. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; 4. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta 5. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, 	60 %	20 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Fasilitasi Kominda) 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat $3/5 \times 100\%$	- Jumlah program nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program : 1. Program Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat: - Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan $1/5 \times 100\%$			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada, sebanyak 3 SOP yang terdiri dari : 1. SOP Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat 2. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Pengambilan Data di Wilayah Kabupaten Tegal 3. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Penelitian di Wilayah Kabupaten Tegal	Ada, sebanyak 1 SOP yaitu: 1. SOP Pendaftaran anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 (dua): <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana diubah dalam 2. Perda Kab. Tegal No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM $2/6 \times 100\%$	-	33%	-	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang terisi sebanyak 4 (empat) - Jabatan yang ada, sebanyak 4 (empat) $4/4 \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang terisi sebanyak 1 (satu) - Jabatan yang ada, sebanyak 1 (satu) $1/1 \times 100\%$	100 %	100 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	-	-	tidak ada	tidak ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SKPD , sebanyak 17 personil 1. Moch. Agus Sunarjo, BA 2. N. Iis Amor Patria, SE,MM. 3. Hamami, SH 4. Sulistiro, S.Pd 5. Rusnani 6. Susi Pangesti 7. Tobirin 8. Suhartono 9. Sugeng Riyadi 10. Mutirah 11. Slamet Raharjo, SE. 12. Ika Puspitasari, SE. 13. Ruspono 14. Karto Mulyono 15. Teguh Budhi Harto 16. Sugeng Winarso 17. Sucipto - Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.925 personil 17/11.925 x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan Wajib Pemerintahan Umum SKPD , sebanyak 3 personil 1. Arif Winandar, S.STP. 2. Edy Winarso 3. Kusmiarso - Total PNS Kabupaten, sebanyak 11.925 personil 3/11.925 x 100% 	0,14 %	0,025 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 (empat) org : <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Agus Sunarjo, BA (Diklat PIM III) 2. N. Iis Amor Patria, SE,MM. (Diklat PIM IV) 3. Hamami, SH (Adum) 4. Sulistiro, S.Pd. (Diklat PIM IV) - Pejabat yang ada, sebanyak 4 (empat) org. 4/4 x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1org: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Winandar, S.STP. (Adum) - Pejabat yang ada, sebanyak 1 (satu) org. 1/1 x 100 % 	100 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 (empat) org. <ol style="list-style-type: none"> 1. Moch. Agus Sunarjo, BA (Pembina Tk. I / IV/b) 2. N. Iis Amor Patria, SE,MM. (Pembina/ IV/a) 3. Hamami, SH (Penata Tk. I / III/d) 4. Sulistiro, S.Pd (Penata Tk. I / III/d) - Jabatan yang ada, sebanyak 4 (empat) jbt. 4/4 x 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 (satu) org. <ol style="list-style-type: none"> 1. Arif Winandar, S.STP. (Penata Tk. I / III/d) - Jabatan yang ada, sebanyak 1 (satu) jbt. 1/1 x 100% 	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 (tiga) jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2015-2019 2. Renja SKPD 2015 3. RKA SKPD 2015	Dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak 3 (tiga) jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2015-2019 2. Renja SKPD 2015 3. RKA SKPD 2015	3 (tiga) jenis dokumen	3 (tiga) jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 (enam) program: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 (dua) program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 (tiga) program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	87,5 %	100%	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						7. Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 (delapan) program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Laporan Kinerja dan Keuangan 6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat 7/8 x 100%	2/2 x 100%			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 (enam) program: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 (enam) program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 (dua) program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 (dua) program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan <p style="text-align: center;">2/2 x 100%</p>	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Tindak Kriminal 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat 6/6 x 100%				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 (enam) program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 (enam) program :	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 (dua) program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan - Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 (dua) program : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2/2 x 100%	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat $6/6 \times 100\%$				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 1.812.653.796,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.934.297.115.658,00	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp. 471.355.546,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.934.297.115.658,00	0,09 %	0,02 %	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 16.960.000,00 - Total Belanja SKPD, sebesar	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.0,00 - Total Belanja SKPD, sebesar	2,13 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. 1.812.653.796,00	Rp. 471.355.546,00			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 55.726.150,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 683.773.752,00	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 467.424.046,00	14,62 %	0 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 55.726.150,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 1.812.653.796,00	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 471.355.546,00	3,61 %	0 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 (tiga) jenis, sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 (tiga) jenis, sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Ada sebanyak 3 (tiga) jenis	Ada sebanyak 3 (tiga) jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau	Jenis dokumennya : 1. Daftar Aset Tetap 2. Kartu Inventaris Barang (KIB)	Jenis dokumennya : 1. Daftar Aset Tetap 2. Kartu Inventaris Barang (KIB)	Ada sebanyak 2 (dua) jenis	Ada sebanyak 2 (dua) jenis	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					asset SKPD				jenis	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) item asset (rusak berat). - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 1.767 asset. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh). - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 1.767 asset. 	31,83 %	31,83 %	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. X- Banner 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Papan Pengumuman 2. X-Banner 	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jmlh sebanyak 2 jenis.	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KET.
						Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Urusan Wajib Pemerintahan Umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	-	-	tidak ada	tidak ada	

Slawi, Januari 2016

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Tegal

M. AGUS SUNARJO
Pembina Tk.I
NIP. 19590914 198411 1 002